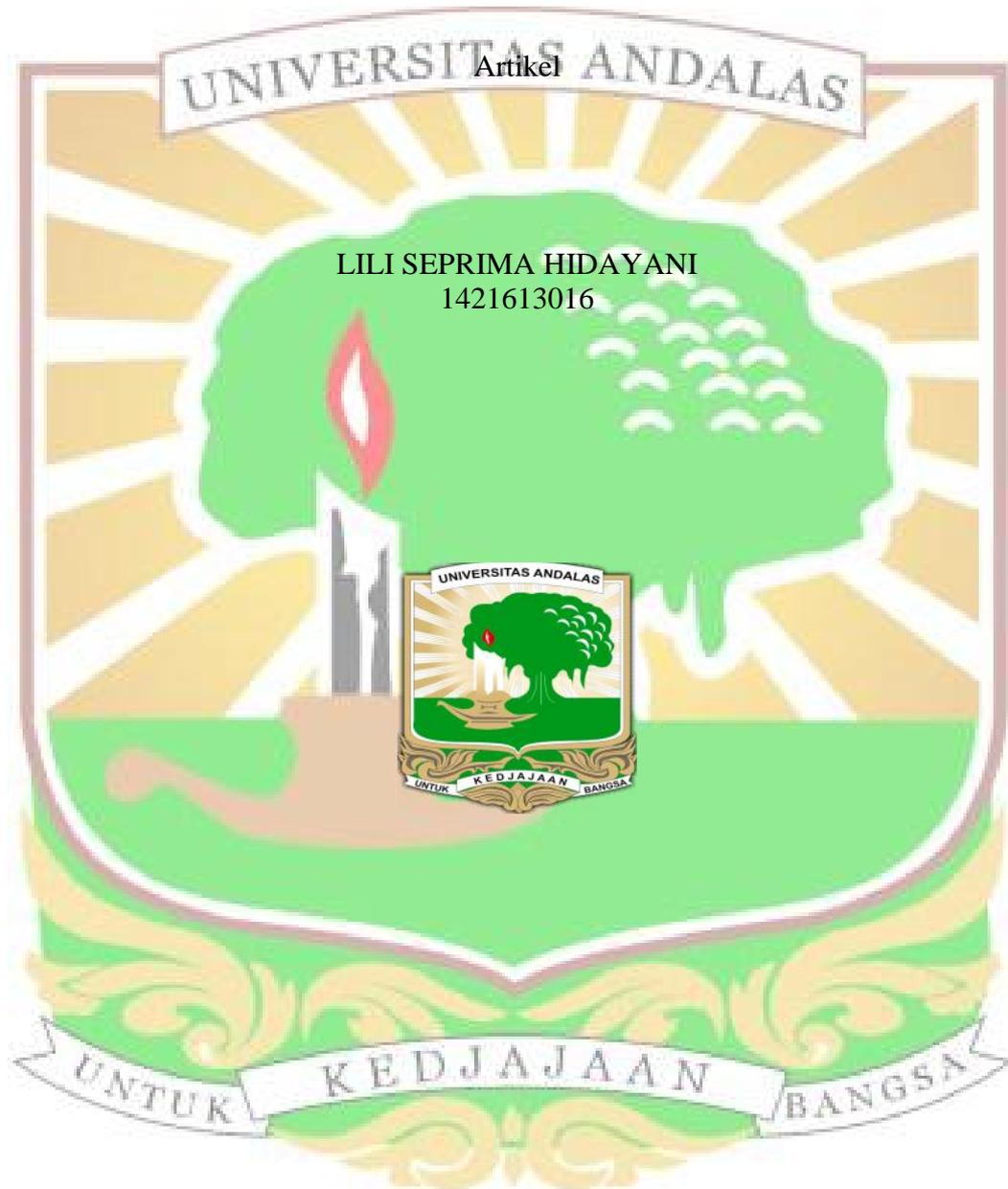


EFEKTIFITAS PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) UNTUK PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KELUARGA
SEJAHTERA I DI KOTA PAYAKUMBUH



Artikel

LILI SEPRIMA HIDAYANI
1421613016

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

2016

EFEKTIVITAS PROGRAM UPPKS UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN KSI DI KOTA PAYAKUMBUH

Oleh : Lili Seprima Hidayani
(Dibawah Bimbingan Prof.Dr.Ir.Asdi Agustar,M.Sc dan Dr.Ir.Faidil Tanjung, M.Si)

Abstrak

Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan Program Nasional yang tumbuh dan berkembang di Kota Payakumbuh sudah dimulai semenjak tahun 1993. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang lebih dikenal dengan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Angka kemiskinan menurut BPS kota Payakumbuh adalah 7.01%, namun dari hasil pendataan keluarga, Keluarga Prasejahtera dan KSI berjumlah 5107 KK. Namun yang tergolong dalam wadah kelompok UPPKS berjumlah 444 Kepala Keluarga, dalam 34 kelompok UPPKS yang tersebar pada 5 kecamatan di Kota Payakumbuh.

Adapun lokasi penelitian adalah 1 kelompok per kecamatan yaitu Kelompok Serumpun Sorai di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kelompok Karya Bersama di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelompok Dahlia di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kelompok Bunga Tanjung di Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kelompok Lamposi I di Kecamatan Latina. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah responden 69 orang, dan metode analisa data yang digunakan adalah statistik diskriptif seperti rata-rata dan persentase. Hasil dan data yang diperoleh didiskripsikan sedemikian rupa berkaitan dengan variabel-variabel yang menjadi tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui efektifitas kelompok UPPKS dilakukan dengan melihat pendapatan yang diperoleh anggota keluarga dengan UPPKS dan tanpa UPPKS. Diskripsi perkembangan Program UPPKS di Kota Payakumbuh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebelum dan sesudah mengikuti program UPPKS.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Program UPPKS di Kota Payakumbuh “efektif” dalam meningkatkan pendapatan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan perkembangan Program UPPKS dari aspek jenis usaha, pengelolaan usaha dan pemasaran hasil usaha belum menunjukkan perkembangan, sedangkan untuk omset usaha menunjukkan perkembangan dengan meningkatnya omset perbulan.

Kata Kunci : Program UPPKS, Peningkatan Pendapatan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga berencana merupakan program pemerintah untuk menjangkau keikutsertaan masyarakat dalam ber KB sekaligus memberdayakan ekonomi keluarga. Semenjak tahun 1993 pemerintah memperkenalkan kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). UPPKS merupakan kegiatan dari keluarga dalam bentuk paguyuban keluarga sejahtera. Dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga beranggotakan keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB (Keluarga Berencana), yang bertujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif dan keterampilan terutama untuk keluarga akseptor yang tergabung dalam kelompok UPPKS sedangkan yang menjadi tujuan khusus di bentuknya kelompok UPPKS ini adalah :

- 1). Meningkatnya jumlah modal usaha untuk mengembangkan kelompok UPPKS.
- 2). Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS yang mempunyai modal usaha.
- 3). Meningkatnya jumlah anggota kelompok yang berusaha.
- 4). Meningkatnya kualitas usaha kegiatan kelompok.
- 5) meningkatnya kesejahteraan keluarga khususnya keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I (keluarga miskin).

Sesuai dengan amanat Undang-undang no 52 tahun 2009

pasal 48 dan instruksi Presiden no 3 tahun 1996 tentang pembangunan keluarga sejahtera yang salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi keluarga yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, semangat serta keterampilan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif melalui wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada keluarga miskin. Kegiatan usaha ini telah dirintis dan dipelopori oleh BKKBN yang merupakan model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk menggerakkan roda ekonomi keluarga.

Peningkatan pendapatan keluarga melalui kelompok kegiatan UPPKS diarahkan kepada seluruh keluarga terutama pasangan usia subur (PUS) keluarga prasejahtera, dan keluarga sejahtera I melalui proses pembelajaran usaha, tenaga terampil dan pementapan peserta KB. Melalui kelompok kegiatan UPPKS setiap keluarga diberi peluang seluas-luasnya untuk belajar berusaha, mengelola modal, bermitra usaha, berorganisasi, mempelajari teknis produksi dan belajar menganalisis pasar. Sedangkan bagi keluarga yang tidak atau belum memiliki minat usaha diberi peluang untuk belajar mengembangkan keterampilan yang diminatinya sehingga dapat menjadi tenaga terampil, handal yang diharapkan dapat mengisi lapangan kerja atau mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah mendukung suksesnya program UPPKS melalui berbagai pola membantu mencari modal yang bersifat hibah maupun pinjaman dengan syarat lunak antara lain : Kredit Usaha Keluarga

Sejahtera (Kukesra), kredit modal dari BUMN (PT.POSINDO, PT. Kimia Farma, PT. Angkasa Pura, dan Bank Pemerintah, Kredit Penggalangan Kemitraan Usaha (KPKU) dan Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPTTG).

Pelaksanaan UPPKS telah berlangsung lebih dari 23 tahun, ternyata dari hasil pendataan keluarga oleh BKKBN tahun 2014 diperoleh gambaran bahwa kurang lebih 56% keluarga di Indonesia masih belum mampu berkembang sebagai pemrakarsa dan pelaksana pembangunan bagi anggotanya sendiri. Sebagaimana yang di sampaikan Mongid (1996) keluarga masih belum atau baru sebatas mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.

Sampai akhir tahun 2015 di Kota Payakumbuh terdapat 34 kelompok UPPKS, dengan jumlah anggota 444 ibu rumah tangga, yang melaksanakan usaha ekonomi produktif di lingkungan rumah tangga masing-masing. Seluruh anggota kelompok melakukan usaha perorangan dan tidak ada lagi melakukan usaha secara kelompok. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai :

“Efektivitas Program UPPKS Untuk Peningkatan Pendapatan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Payakumbuh”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan data dan fakta serta petunjuk pelaksanaan peningkatan pendapatan keluarga melalui kelompok UPPKS. Adapun permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kelompok UPPKS dalam

peningkatan pendapatan KPS dan KS I

2. Bagaimana perkembangan kelompok UPPKS dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya di Kota Payakumbuh

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektifitas UPPKS dalam peningkatan pendapatan KPS dan KS I di Kota Payakumbuh
2. Untuk mengetahui gambaran perkembangan kelompok UPPKS di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Barat dan BPMP&KB Kota Payakumbuh dapat menyusun program yang lebih intensif untuk mengembangkan kelompok UPPKS dalam peningkatan pendapatan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, sekaligus untuk menyampaikan kondisi yang objektif kelompok UPPKS yang ada di Kota Payakumbuh
2. Manfaat pengembangan ilmu, penelitian di harapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan pada 5 (lima) kecamatan dalam wilayah Kota Payakumbuh. Berdasarkan data BPMP dan KB Kota Payakumbuh tahun 2015 terdapat 34 kelompok UPPKS yang tersebar di 5 (lima)

kecamatan. Pada masing-masing kecamatan di lakukan penelitian untuk 1 kelompok. Penelitian di laksanakan 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal yang di tetapkan oleh Pascasarjana Unand

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode survey, dimana anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok UPPKS akan di pilih sebagai responden. Pada penelitian ini akan di tetapkan sebanyak 69 responden (semua anggota kelompok) dengan distribusi sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3. Distribusi responden pada tiap kelompok

N O	KELURAH AN	NAMA KELOMP OK	JUMLAH REPO NDEN
1.	Payolansek	Sarumpun	15 orang
2.	Ikua Koto	Sorai	10 orang
3.	Di Balai	Karya	20 orang
4.	Padang	Bersama	13 orang
5.	Tiakar Swh Pd Aur Kuning Sungai Durian	Bunga Tanjung Dahlia Lampasi I	11 orang
JUMLAH RESPONDEN			69 orang

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang di kumpulkan adalah data sekunder yang berguna untuk mendukung data primer yang ada di lapangan. Data sekunder yang di kumpulkan adalah adalah laporan perkembangan kelompok UPPKS selama kurun waktu 3 tahun dan data mengenai aktifitas kelompok UPPKS serta regulasi yang berkaitan dengan kelompok UPPKS yang menjadi objek penelitian. Data ini di kumpulkan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Camat dan Kantor Lurah di 5

(lima) kecamatan dalam wilayah Kota Payakumbuh. Kegiatan ini di lakukan untuk memperoleh gambaran diskripsi daerah penelitian. Metode pengumpulan data primer di lakukan dengan metode wawancara menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang di siapkan terlebih dahulu. Selain itu juga di lakukan wawancara mendalam (*Indepth Interviewing*) terhadap informan kunci yang terdiri dari: Pembina wilayah kerja / PKB, lurah dan Kasie Keluarga sejahtera BPMP dan KB Kota Payakumbuh.

D. Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah di tetapkan maka analisa data akan di lakukan dengan statistik diskriptif seperti rata-rata, persentase dan standar deviasi (SD). Formula berikut ini digunakan untuk mengetahui peningkatan pendapatan keluarga sebagai berikut :

1. Pendapatan Keluarga dengan kelompok UPPKS :

$$Y = P1 + P2 + P3 + P_x + P_n$$

Y = Total

pendapatan keluarga

P1 = Pendapatan

dari kepala keluarga

P2 = Pendapatan

dari istri

P3 = Pendapatan

dari anak

P_x = Pendapatan

dari kegiatan UPPKS

P_n = Pendapatan

lainnya.

2. Pendapatan Tanpa usaha kelompok UPPKS

$$Y1 =$$

$$P1 + P2 + P3 + P_n$$

Y1 = Total
pendapatan tanpa usaha
UPPKS

$AY_x = Y - Y1$
x 100%

Ax = Peningkatan
pendapatan dengan adanya usaha
UPPKS

Analisis deskriptif yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kelompok UPPKS akan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang di peroleh dari data primer dan data skunder. Data primer dan data skunder yang akan diinterpretasikan berupa :

1. Jenis Usaha
2. Pengelolaan usaha
3. Omset usaha
4. Pemasaran hasil usaha

E. Defenisi Operasional Variabel dan Pengukurannya

1. Efektifitas program UPPKS, adalah kemampuan modal yang dipinjamkan oleh program UPPKS untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang di ukur dari peningkatan sebelum dan sesudah mendapatkan modal usaha kelompok UPPKS.
2. Pendapatan, adalah kemampuan hasil usaha yang di miliki oleh anggota keluarga yang mampu menghasilkan produksi. Kalkulasi seluruh penghasilan anggota keluarga yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3. Omset usaha, adalah nilai total penjualan hasil produksi 1 bulan.
4. Peningkatan pendapatan keluarga adalah hasil usaha

dalam bentuk nilai rupiah yang di peroleh anggota setelah mengikuti program kegiatan UPPKS.

5. Jumlah modal yang dipinjam dari program UPPKS adalah : total rupiah yang sudah dipinjam oleh anggota kelompok dari program UPPKS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kelompok UPPKS

Efektivitas merupakan kesesuaian antara output dengan tujuan yang di tetapkan. Tingkat efektivitas kelompok UPPKS dalam tujuan penelitian adalah peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan UPPKS yang di lakukan. Tingkat efektivitas kelompok UPPKS dapat di evaluasi dari pendapatan yang di terima anggota kelompok sebelum dan sesudah mengikuti program UPPKS. Sedangkan efektivitas lain dilihat dari perkembangan kelompok UPPKS melalui jenis usaha yang di lakukan, pengelolaan usaha, omset usaha dan pemasaran hasil usaha anggota kelompok UPPKS.

1. Latar Belakang Program UPPKS

Terbentuknya kelompok UPPKS diawali pada 1979 dengan nama Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan berubah menjadi UPPKS pada 1994, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, yaitu tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dengan menghimpun sebanyak 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) keluarga peserta KB yang melakukan kegiatan usaha keluarga secara perorangan maupun

kelompok. Tujuan awal adalah agar pendapatan keluarga yang tergabung dalam UPPKS itu meningkat sekaligus memantapkan kesertaan mereka sebagai peserta keluarga berencana yang aktif. Tahun 1994 UPPKS ini dikembangkan secara Nasional dengan desain Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra) sekaligus membuka Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra), melalui pengelolaan kredit oleh Bank Negara Indonesia bekerjasama dengan PT POSINDO. Dana awal secara Nasional merupakan sumbangan para pengusaha Kelompok Pengusaha Nasional di Jimbaran Bali yang bertekad menyalurkan CSR (*Company Social Responsibility*) perusahaan mereka melalui sistem Takesra-Kukesra dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ratusan ribu kelompok segera terbentuk dengan pinjaman awal tahap pertama sebanyak Rp. 500.000 dan Tabungan awal Rp300.000 per kelompok yang dianggap memadai menurut nilai rupiah pada waktu itu. Pinjaman tahap berikutnya mengikuti kelipatan hingga putaran ke-5, dan diharapkan dalam proses itu jumlah tabungan juga meningkat dari peserta melalui kelompok. Setelah empat tahun berjalan dan sebagian besar kelompok masuk putaran ke-3 dan ke-4, maka pada 1997 terjadilah krisis ekonomi (krisis moneter) yang membuat semua proses UPPKS menjadi stagnan, tidak mampu lagi berkembang karena nilai rupiah merosot terhadap semua mata uang asing. Kebijakan Pengelolaan UPPKS secara Nasional adalah mencairkan tabungan kelompok untuk dikembalikan kepada anggota sesuai jumlah tabungan yang ada pada data PT POSINDO seluruhnya

dilunasi pada 2004. Sejak 2004 diupayakan agar kelompok UPPKS yang masih memiliki kegiatan dan kepengurusannya masih ada untuk diaktifkan kembali dengan memberikan pinjaman modal yang bersumber dari APBN namun cakupan kelompok penerima pinjaman sangat terbatas setiap tahunnya hingga sekarang. Jumlah pinjaman berkisar 2,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per kelompok yang jumlah anggotanya berkisar 5 hingga 10 orang ibu. Setelah sepuluh tahun pengelolaan UPPKS, maka perlu dilakukan kajian yang dalam, di samping evaluasi rutin yang dilakukan setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, maka dikembangkan kebijakan baru tentang pemberdayaan ekonomi keluarga di samping ketahanan keluarga. Akan tetapi, sejak 2010 kebijakan bantuan pinjaman modal kepada kelompok dari sumber APBD maupun APBN sudah tidak ada lagi dengan alasan tidak dibenarkan lagi pemberian hibah dalam bentuk bantuan modal kepada UPPKS karena skim pemberian kredit melalui Bank Pemerintah sudah dianggap memadai seperti KUR yang disalurkan melalui BRI. Berdasarkan evaluasi petugas BRI bahwa kelompok UPPKS dinilai tidak layak menerima KUR karena kegiatan usaha riil kelompok hampir tidak ada. Jumlah Kelompok UPPKS yang masih ada di Kota Payakumbuh berdasarkan laporan yang dihimpun dari BPMP dan KB Kota Payakumbuh terdapat 34 Kelompok yang ada dalam data base masih aktif dengan anggota sebesar 444 orang 8.69 persen dari Keluarga Pra-

sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang terdiri dari 5107 ibu anggota dan pengurus. Para pengelola UPPKS ini masih masih beranggapan bahwa Kelompok UPPKS ini adalah model yang paling tepat namun memerlukan revitalisasi dari segi pengelolaan dan implementasi pembinaan di lapangan. Untuk membantu revitalisasi Pengelolaan UPPKS ini, maka pada kesempatan ini akan mencoba menggali variabel-variabel jenis usaha, pengelolaan UPPKS, omset dan pemasaran hasil kelompok UPPKS.

2. Karakteristik Keluarga Anggota UPPKS

Keanggotaan UPPKS ini terdiri dari kaum perempuan/ibu yang berstatus keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (keluarga Miskin) yang ada pada masing-masing kelurahan di mana ada kelompok UPPKS dan anggota lain yang di tetapkan berdasarkan musyawarah kelompok akseptor yang bersangkutan. Tujuan umum dibentuknya lembaga UPPKS ini adalah untuk menunjang pelaksanaan program KB dalam rangka mempercepat pelebagaan dan pembudayaan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera)

Sedangkan Tujuan Khusus dibentuknya lembaga UPPKS antar lain :

1. Menumbuhkan dinamika kelompok agar anggota dapat didorong untuk meningkatkan dan memantapkan kesertaan dalam ber KB, terutama kesertaan dalam pemakaian alat kontrasepsi yang efektif.
2. Mengisi kegiatan kelompok peserta KB dengan kegiatan ekonomi produktif, sehingga dapat menjamin kelangsungan

hidup kelompok-kelompok tersebut.

3. Mengembangkan kegiatan sosial ekonomi, khususnya para perempuan peserta KB untuk meningkatkan perannya dalam keluarga maupun masyarakat.
4. Merangsang kelompok untuk dapat dalam membangun ekonomi keluarga dengan melakukan usaha-usaha mandiri produktif.
5. Memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman berorganisasi maupun mengatur administrasi keuangan.
6. Merangsang kelompok lain agar berprestasi seperti kelompok yang mendapatkan bantuan permodalan.

Keluarga terdiri dari orang-orang yang disatukan dalam ikatan perkawinan, darah dan ikatan adopsi, para anggota sebuah keluarga hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga, atau jika mereka hidup secara terpisah, mereka tetap menganggap rumah tangga tersebut sebagai rumah mereka Friedman, (1988) Anggota keluarga berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam peran-peran sosial keluarga seperti suami-istri, ayah-ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan saudara keluarga sama-sama menggunakan kultur yang sama yaitu kultur yang diambil dari masyarakat dengan beberapa ciri unik tersendiri. Menurut Undang-undang no 52 tahun 2009 bahwa Keluarga di bentuk atas perkawinan yang syah yang merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah :

1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan yang syah atau adopsi.
2. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain.
3. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial : suami, istri, anak, kakak dan adik.
4. Mempunyai tujuan : menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota.

Berikut ini akan disampaikan karakteristik keluarga pada kelompok UPPKS daerah penelitian;

a. Umur Anggota Kelompok UPPKS

Bila di kaitkan dengan usia produktif menurut BPS adalah penduduk yang berusia 14 hingga 60 tahun. Sedangkan anggota UPPKS seluruhnya ibu-ibu pada umumnya tergolong usia produktif yang diharapkan dapat membantu keluarga dalam peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Persentase tertinggi berusia 41 hingga 50 tahun 44,93 persen sedangkan usia lebih dari 60 tahun 13,04 % (9 orang responden) dan untuk usia kurang dari 30 tahun masih ada 5 orang responden dengan persentase 7,25 % . Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 7 berikut ini

Tabel 7. Distribusi jumlah anggota kelompok UPPKS menurut kelompok umur di Kota Payakumbuh.

NO	Umur (tahun)	Jumlah	Persentase
1	<30	5	7,25
2	31 – 40	15	21,74
3	41 – 50	31	44,93
4	51 – 60	9	13,04
5	60	9	13,04
Jumlah		69	100,00

Jumlah anggota UPPKS berada dalam usia kelompok produktif dapat di interprestasikan dari berbagai aspek. Salah satu di antaranya bahwa ibu yang tergabung dalam kelompok UPPKS masih menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Disisi lain dapat juga di interprestasikan bahwa dengan usia produktif dapat menggeluti usaha kecil yang bisa di lakukan di lingkungan rumah tangga. Dengan pengetahuan dan modal yang relative kecil sudah dapat melakukan usaha.

b. Pendidikan formal anggota UPPKS

Pendidikan formal merupakan salah satu indikator yang dapat di jadikan alat ukur untuk tingkat pengetahuan, keterampilan dan kemampuan mengelola suatu usaha. Diduga ada hubungan linier antara pendidikan formal dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan anggota kelompok dalam mengelola usahanya. Anggota kelompok dengan pendidikan formal yang tinggi di harapkan lebih baik mngelola usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarganya.

Dari hasil wawancara yang di lakukan kepada responden dapat di katakan bahwa anggota kelompok UPPKS adalah anggota yang

terdidik. Hal ini dapat di lihat bahwa mayoritas pendidikan anggota kelompok UPPKS adalah tamatan SLA 43,47 persen, yang tidak bersekolah masih ada 2,9 persen, tamatan SD 34,79 persen dan SLP 18,84 persen.

Tabel 8. Distribusi jumlah anggota kelompok UPPKS Berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tdk sekolah	2	2,9
2	SD	24	34,79
3	SLP	13	18,84
4	SLA	30	43,47
5	PT	-	-
Jumlah		69	100,00

Untuk jumlah anggota kelompok yang pendidikannya relative rendah di duga erat kaitannya dengan fenomena anggota masyarakat di daerah penelitian masih jauh dari wilayah perkotaan. Pada wilayah yang dekat dengan pusat kota lebih baik jika di bandingkan dengan masyarakat yang jauh dari pusat kota.

c. Status kepemilikan tempat tinggal

Salah satu indikator untuk menentukan tahapan keluarga sejahtera menurut adalah memiliki rumah yang layak huni dan status kepemilikannya adalah milik sendiri. Status rumah dengan kepemilikannya milik sendiri atau yang di dapat dengan warisan, akan membuat anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok UPPKS akan fokus memikirkan peningkatan pendapatan melalui usaha yang di lakukannya. Adapun kepemilikan rumah anggota kelompok UPPKS pada Tabel berikut ini.

Tabel 9. Distribusi status kepemilikan tempat tinggal Anggota kelompok UPPKS di Kota Payakumbuh

No	Status	Jumlah	Persentase
1	Milik sendiri	52	75,36
2	Sewa/kontrak	1	1,45
3	Warisan	4	5,8
4	Lainnya	12	7,39
Jumlah		69	100%

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa 73,37 persen anggota kelompok UPPKS menempati rumah milik sendiri, warisan 5,8 persen dan lainnya 12 responden dengan persentase 7,39. Dengan kondisi di atas jelas bahwa hanya 1 orang responden yang masih berupaya untuk sewa/ kontrakan rumah yang di tempatinya.

d. Pekerjaan Utama Suami

Suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga mempunyai pekerjaan yang paling dominan adalah pekerjaan petani / peternak 30,43 persen , untuk pekerjaan penerima jasa 28,99 persen dan wirausaha kecil 13,04 persen, pedagang 11,6 persen dan PNS golongan I 1,45 persen. Sedangkan istri yang tergabung dalam kelompok UPPKS menjalankan kegiatan usaha kecil merupakan sebagai tambahan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Hal ini dapat di pahami karena pilihan untuk bergabung dengan kelompok UPPKS merupakan alternative yang terbaik yang dapat di lakukan oleh ibu untuk membantu menambah pendapatan keluarga. Ada usaha kecil yang di lakukan anggota kelompok UPPKS sama dengan pekerjaan utama suami, seperti halnya usaha ternak ikan lele pada kelompok Bunga Tanjung di kelurahan Padang Tiakar

dan kelompok Sarumpun Sorai di Kelurahan Payolansek. Secara rinci dapat di lihat penghasilan utama suami pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Distribusi pekerjaan suami anggota kelompok UPPKS di Kota Payakumbuh.

No	Pekerjaan utama	Jumlah	Persentase
1	Petani/ Peternak	21	30,44
2	Pedagang	7	10,14
3	Usaha kecil/wirasuasta	9	13,04
4	Penerima jasa (tukang /sopir)	21	30,44
5	PNS	1	1,45
6	Industri kerajinan/ RT	2	2,90
7	Janda	8	11,59
	Jumlah	69	100,00

e. Profil jumlah anak anggota UPPKS yang masih menjadi tanggungan keluarga.

Salah satu penyebab keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tergantung kepada kondisi jumlah anggota (jumlah anak) tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Jumlah anak yang banyak akan membuat keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tabel berikut dapat di lihat jumlah anak anggota UPPKS.

Tabel 11. Distribusi jumlah anak anggota UPPKS di Kota Payakumbuh.

No	Jumlah anak	Jumlah	Persentase
1	Tdk punya tanggungan	8	11,59
2	1 - 2 orang	35	50,73
3	3 - 5 orang	26	41,67
4	> 5	-	-

Jadi Jumlah	69	100,00
-------------	----	--------

Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan menggambarkan tingkat pengeluaran yang harus di sediakan. Dari data di atas terlihat bahwa responden yang memiliki jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan rentangan 3-5 orang persentasenya cukup tinggi 41.67 persen. Sedangkan untuk rentangan 1 – 2 orang 50.73 persen dan yang tidak punya tanggungan keluarga sebanyak 11.59 persen (anak sudah dewasa dan sudah punya keluarga yang menjadi tanggungannya). Kaitannya dengan responden keluarga Pra Sejahtera dan keluarga sejahtera I, maka jumlah anggota keluarga yang lebih dari 3 orang ini menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, melalui kegiatan UPPKS ini dapat di bantu oleh istri dengan adanya usaha ekonomi produktif.

f. Profil kelompok UPPKS

Jumlah kelompok UPPKS yang ada di Kota Payakumbuh sebanyak 34 kelompok yang tersebar di lima Kecamatan dalam wilayah Kota Payakumbuh, setiap kelompok terdata dalam data base kelompok UPPKS tingkat Nasional. Kegiatan kelompok UPPKS yang ada di Kota Payakumbuh lebih dominan melakukan usaha pinjam modal usaha keluarga kepada anggota kelompok UPPKS. Untuk pembinaan dan bimbingan dilakukan oleh Pembina wilayah atau penyuluh KB yang ada pada masing- masing keluarahan. Untuk pembinaan usaha juga dilakukan oleh Dinas Koperindag dan UMKN serta Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Kelompok UPPKS ini sudah ada semenjak tahun 1993 di Kota Payakumbuh. Kelompok yang

di lakukan penelitian dapat di lihat tahun mulai kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 12. Tahun berdiri kelompok UPPKS yang di teliti

No	Nama kelompok	Th berdiri	Lamanya
1	Sarumpun sorai	2003	13 th
2	Karya Bersama	2011	5 th
3	Bunga Tanjung	2013	3 th
4	Dahlia	2006	10 th
5	Lampasi 1	2008	8 th

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok serumpun sorai yang terletak di Payolansek kecamatan Payakumbuh Barat paling lama berdiri yaitu sudah berjalan 13 th sudah banyak yang dapat dilakukan pengurus bersama anggota kelompok untuk memajukan kelompoknya bahkan untuk penilaian kelompok UPPKS yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai ketingkat nasional, kelompok UPPKS Sarumpun Sorai sudah mengharumkan nama Kota Payakumbuh memperoleh juara III tahun 2014 dan juara 3 untuk pengelolaan kelompok UPPKS terbaik tingkat Provinsi Sumbar, kemudian diikuti oleh kelompok Dahlia sudah berdiri 10 tahun dan yang paling kecil usia berdirinya adalah kelompok bunga tanjung yaitu 3 tahun. Namun dari 5 kelompok yang menjadi responden penelitian, usaha yang paling berkembang adalah kelompok bunga tanjung dengan usaha peternakan ikan lele.

3. Pelaksanaan Program UPPKS

Di Kota Payakumbuh masih banyak terdapat keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 yang perlu di tingkatkan pendapatannya. Pada akhir tahun

2015 dan hasil pendapatan keluarga yang di laksanakan BPMP dan KB tercatat keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 sebanyak 5107 KK. Salah satu upaya untuk peningkatan pendapatan keluarga tersebut dilakukan melalui kelompok UPPKS yang ada pada masing-masing kelompok. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 (keluarga miskin) di kelompokkan dalam wadah kelompok UPPKS.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, BPMP-KB Kota Payakumbuh telah di perkuat dengan adanya pemberian pinjaman modal dalam bentuk uang tunai kepada kelompok UPPKS yang berkisar Rp. 5.000.0000 s/d Rp. 25.000.000 pada masing-masing kelompok dengan biaya administrasi 6% per tahun. Adapun ketentuan-ketentuan yang di perhatikan dalam penyaluran pinjaman kepada kelompok UPPKS sbb :

1. Kelompok UPPKS yang akan mendapatkan pinjaman modal harus teregistrasi dalam data basis kelompok UPPKS.
2. Dana pinjaman kelompok di berikan dengan cara bergilir dan proritas kepada kelompok yang belum pernah mendapat pinjaman modal usaha.
3. Besarnya bantuan modal kelompok bervariasi tergantung usaha kelompok dan dana yang tersedia.
4. Kelompok UPPKS bebas memilih jenis usaha dan sesuai dengan potensi lingkungan, demi kepentingan keberlangsungan usaha.
5. Khusus untuk pinjaman modal usaha yang bersumber dari lembaga luar BPMP dan KB serta BKKBN akan mengikuti mekanisme dan sistim

administrasi yang berlaku dari lembaga yang bersangkutan.

a) Jenis Usaha

Secara umum bidang usaha kecil yang dilakukan oleh penerima pinjaman modal UPPKS dari data responden yang di kumpulkan dapat di kategorikan sebagai usaha produksi perdagangan dan jasa. Jenis usaha produksi meliputi industri kerajinan, pertanian/peternakan dan makanan. Berikut ini rincian jenis usaha kecil penerima UPPKS.

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa jenis usaha produksi merupakan usaha yang paling dominan yaitu 55 responden dengan persentase 79,71 usaha perdagangan, 18.84 persen dan jasa 1.45 persen. Adapun usaha produksi yang dilakukan adalah kerajinan anyaman sangkar ayam, souvenir keperluan rumah tangga, pertanian sayuran, ternakan ikan lele dan usaha makanan ringan (kripik lento dan rakik). Untuk usaha perdagangan adalah barang harian dan menjual makanan ringan. Sedangkan untuk usaha jasa adalah untuk becak.

b) Pengelolaan Usaha

Pengelolaan kelompok UPPKS secara berjenjang di mulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Propinsi Sumatera Barat, pada tingkat kelurahan penganggung jawab Penyuluh KB (PKB) pada masing-masing kelurahan, dengan peranan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan informasi tingkat perkembangan UPPKS wilayah kerja kepada pengelola dan pemantau kegiatan UPPKS tingkat Kota Payakumbuh.
- b. Melakukan pembinaan kelompok UPPKS yang ada pada Wilayah kerja PKB, dan

berkoordinasi dengan lintas sector terkait untuk perkembangan kelompok UPPKS.

- c. Melakukan Evaluasi dan monitoring kepada kelompok UPPKS yang ada di wilayah binaan PKB.
- d. Menyetujui dan menyalurkan permohonan pinjaman modal kelompok UPPKS yang melakukan usaha.

Untuk tingkat Kota Payakumbuh yang bertanggung jawab untuk pengelolaan kelompok UPPKS adalah BPMP dan KB , peranan sebagai berikut :

- a. Memberikan laporan perkembangan UPPKS tingkat Kota Payakumbuh ke BKKBN Propinsi Sumatera Barat.
- b. Menyalurkan daftar usulan kelompok UPPKS calon penerima dana modal usaha ke BKKBN Propinsi Sumatera Barat.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok UPPKS.
- d. Memberikan pembinaan kepada pengelola kelompok UPPKS di masing-masing kelurahan.

Pengelolaan usaha yang dilakukan sekarang ini masih di kelola secara tradisional dengan persentase 94.20 sedangkan yang di kelola dengan menggunakan teknologi tepat guna 5.80 persen, pada kelompok sarumpun sorai di kelurahan Payolansek kecamatan Payakumbuh Barat dan kelompok Dahlia di Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Pola usaha yang dilakukan sekarang ini seluruhnya adalah usaha sendiri yang di kelola dalam lingkungan rumah tangga masing-masing. Namun untuk hasil usahanya di kelola secara kelompok seperti

halnya produksi makanan ringan yang di hasilkan oleh anggota kelompok di bantu pemasarannya melalui pengepul yang datang ke kelompok.

c) Pendapatan Keluarga Dengan kelompok UPPKS

Pendapatan keluarga yang di maksudkan adalah penghasilan yang di terima oleh keluarga inti yaitu ayah, ibu, anak, pendapatan lainnya dan pendapatan yang yang di terima oleh keluarga dengan kegiatan UPPKS yang di lakukannya. Menurut Gilarso (1992) Pendapatan keluarga adalah segala bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Penghasilan yang di terima oleh anggota keluarga ayah, ibu dan anak yang sudah bekerja yang diterima oleh dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan pada suatu keluarga dalam satu bulan. Penghasilan yang di dapat dalam keluarga dengan menggunakan kelompok UPPKS dapat di lihat sebagai berikut :

1) Penghasilan suami perbulan di Kota Payakumbuh.

Suami adalah pencari nafkah utama dalam keluarga dari hasil wawancara dengan responden bahwa penghasilan suami keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I persentase tertinggi adalah 56,52 pada rentang penghasilan Rp. 1.100.000.- sampai dengan Rp 2.000.000.- namun masih ada yang kurang dari Rp. 1.000.000.- dengan pesentase 20,29 %. Dan yang melebihi dari Rp. 3.000.000 dengan pesentase 2,90 % serta 7 orang

responden berstatus janda dengan persentase 11,59 %.

2) Penghasilan istri tanpa kelompok UPPKS perbulan Di Kota Payakumbuh.

Untuk menutupi kebutuhan keluarga istri juga berperan membantu suami mencari nafkah dan mempunyai penghasilan sendiri, penghasilan tertinggi istri dari 69 responden berada pada rentang penghasilan Rp. 600.000 sampai dengan Rp. 1.000.000.- dengan persentase 44,93 %, kurang dari Rp. 500.000.- dengan persentase 27,54 % , penghasilan rentang Rp. 1.100.000.- sampai dengan Rp. 2.000.000.- dengan persentase 10,14 % dan yang tidak punya penghasilan 13,04 persen.

Dari hasil penelitian di atas dapat di gambarkan bahwa ibu / wanita berpotensi dalam memberikan kontribusi pendapatan bagi keluarga, khususnya dalam rumah tangga miskin. Dalam rumah tangga miskin anggota rumah tangga wanita turut serta dalam bekerja untuk menambah pendapatan rumah tangga yang dirasakan jauh dari kata berkecukupan. Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan pria, serta makin disadari perlunya kaum wanita ikut berpartisipasi dalam pembangunan terutama dalam keluarga, selain itu juga karena adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan mungkin juga kebutuhan hidup dari keluarga yang menjadi tanggungannya dengan

penghasilan sendiri. Dengan adanya produktifitas akan dapat menghasilkan usaha dan menciptakan lapangan kerja di lingkungan rumah tangga sendiri misalnya muncul industri kerajinan tangan dan industry makanan ringan yang memberikan kontribusi peningkatan pendapatan keluarga.

3) Penghasilan anak yang masih menjadi tanggungan keluarga.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga anak yang menjadi tanggung jawab keluarga ada yang mempunyai penghasilan sendiri dan memberikan kontribusi untuk pendapatan keluarga. Dari 69 responden yang mempunyai anak yang memiliki penghasilan sendiri sebanyak 26 responden dengan persentase 37,68 persen untuk penghasilan kurang dari 1 juta, 8,70 persen untuk penghasilan 1 juta sampai dengan 2 juta 13,04 persen, untuk penghasilan besar dari 2 juta sampai dengan 3 juta 5,80 persen dan penghasilan anak besar dari 3 juta 10,14 %. Sedangkan untuk yang tidak punya penghasilan dengan persentase 62,32 % kondisi yang tidak punya penghasilan ini karena mereka berada pada usia sekolah dan balita.

Anak yang sudah mempunyai penghasilan sendiri sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dari hasil pengamatan yang di lakukan terhadap responden, anak yang sudah memiliki penghasilan sendiri memberikan penghasilannya kepada orang tua dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga membantu pembiayaan pembangunan rumah yang mereka tempati dan membantu adik-adik mereka yang membutuhkan biaya pendidikan.

4) Pendapatan keluarga yang di dapat dari kegiatan UPPKS

Pemanfaatan modal usaha kelompok UPPKS oleh responden untuk berusaha melakukan kegiatan produktif membantu dalam peningkatan pendapatan keluarga. Pendapatan yang di peroleh keluarga dari melakukan kegiatan UPPKS , seluruh responden yang berjumlah 69, memberikan jawaban bahwa dalam mengikuti kegiatan UPPKS , seluruhnya mendapatkan tambahan penghasilan. Ada yang mengabungkan usaha kelompok UPPKS dan usaha utamanya. Pendapatan yang di peroleh dari melakukan kegiatan UPPKS dalam rentang kurang dari Rp 500.000.- dengan persentase 49,28 % dan 49,28 % untuk rentang Rp. 600.000 sampai dengan 1 Juta , serta satu orang responden memperoleh penghasilan lebih Rp. 1.100.000.- dengan persentase 1,44 %. Pendapatan lainnya (wakaf/warisan) yang di terima keluarga anggota kelompok UPPKS di Kota Payakumbuh.

Keluarga yang tergabung dalam kelompok UPPKS di dominasi oleh keluarga yang berstatus keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, dengan status ini mereka berhak menerima pendapatan lainnya berupa wakaf dan warisan dari keluarga yang mampu di sekitarnya maupun dari badan amal yang mengelola wakaf maupun zakat. Dari hasil wawancara yang di peroleh melalui responden di ketahui bahwa 3 orang responden menerima zakat dan wakaf dalam rentang pendapatan yang berbeda 2 orang dalam rentang Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000.- dan 1 responden mendapat pendapatan lainnya di atas Rp. 1.000.000.-. Sedangkan yang tidak menerima pendapatan lainnya

berjumlah 66 responden dengan persentase 95.65 %

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh anggota keluarga secara finansial meningkat setelah di akumulasi dari pendapatan yang diterima dari kegiatan kelompok UPPKS. Secara total dari 69 responden, meningkat pendapatan keluarga dengan rata-rata peningkatannya 17.61 persen. Rata-rata pendapatan keluarga dengan UPPKS masing-masing responden adalah Rp. 550.724.- (Lima ratus lima puluh tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Dilihat dari pendapatan perkapita Kota Payakumbuh tahun 2015 adalah Rp. 2.964.166.- perkapita, (Bappeda PDRB Kota Payakumbuh tahun 2015), sedangkan rata-rata pendapatan keluarga setelah mengikuti program UPPKS berjumlah Rp. 3.678.260.-

d). Pendapatan Keluarga Tanpa UPPKS

Pendapatan keluarga tanpa kelompok UPPKS adalah pendapatan yang diperoleh oleh anggota keluarga yaitu Suami, istri, anak tanpa adanya kontribusi dari kegiatan kelompok UPPKS. Total pendapatan 69 responden adalah Rp. 215.800.000,- dengan rata-rata () pendapatan masing-masing keluarga adalah Rp. 3.127.536.-.

e). Efektivitas UPPKS dilihat dari Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sebagaimana yang di sampaikan sebelumnya bahwa produktivitas keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tidak optimal, melalui peran ibu dalam keluarga dapat meningkatkan produktivitas yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan anggota

keluarga. Tingkat pendapatan yang diterima anggota keluarga sesudah mengikuti program UPPKS pada umumnya meningkat. Hal ini diketahui berdasarkan jawaban responden dari wawancara yang dilakukan peningkatan ini dapat dilihat dalam jumlah rupiah yang didapat setelah mengikuti kegiatan UPPKS. Sebelum mengikuti kegiatan UPPKS masih ada keluarga yang berpenghasilan kurang dari 1 juta rupiah namun setelah mengikuti kegiatan UPPKS keluarga di maksud sudah pindah ke rentang penghasilan yang lebih dari 1 juta rupiah. Secara akumulasi pendapatan keluarga sebelum mengikuti UPPKS berada pada rentang penghasilan Rp. 1.100.000.- sampai dengan Rp. 2.000.000.- dengan persentase 33.33 % namun setelah mengikuti kegiatan UPPKS rentang ini berkurang dengan persentase 13.04 % dalam arti pendapatan keluarga setelah mengikuti kegiatan UPPKS meningkat dan berpindah ke rentang yang lebih tinggi. Begitu juga untuk rentang penghasilannya Rp. 2.100.000.- sampai dengan Rp. 3.000.000.- sebelum mengikuti kegiatan UPPKS 27.54 % dan setelah mengikuti kegiatan UPPKS meningkat menjadi 39.13 %. Peningkatan pendapatan keluarga setelah mengikuti kegiatan UPPKS dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden berkisar antara Rp250.000.- sampai dengan Rp1.500.000.-. Bervariasinya peningkatan pendapatan keluarga yang mengikuti kegiatan UPPKS ini sangat tergantung kepada jenis usaha yang dilakukan. Pendapatan yang tinggi diperoleh dari usaha ternak ikan lele yang dilakukan di kelompok Bunga Tanjung kelurahan Padang Tiakar Kecamatan

Payakumbuh Timur, dan Kelompok Serumpun Sorai di Payolansek Kecamatan Payakumbuh Barat.

C. Perkembangan Kelompok UPPKS

Diskripsi perkembangan kelompok UPPKS di Kota Payakumbuh akan di jelaskan berupa : Jenis usaha, Pengelolaan usaha, Omset Usaha, dan Pemasaran hasil usaha. UPPKS yang akan di jelaskan adalah 5 kelompok teliti meliputi: Kelompok Sarumpun Sorai di Kelurahan Payolansek, Kelompok Karya bersama di Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kelompok Bunga Tanjung di Kelurahan Padang Tiakar, Kelompok Dahlia di Aur Kuning Sawah Padang, dan Kelompok Lamposi I di Kelurahan Sungai Durian.

Setelah di adakan revitalisasi kelompok UPPKS di Kota Payakumbuh, perkembangan kelompok UPPKS cukup mengembirakan hal ini di tandai dengan bertambahnya kelompok UPPKS yang ada di Kota Payakumbuh. Awal berdirinya kelompok UPPKS di Kota Payakumbuh Pada Tahun 1993 berjumlah 25 kelompok sekarang menjadi 34 kelompok, yang di awali dengan peluncuran modal awal sebesar Rp. 5.000.000.- untuk kelompok yang baru di bentuk. Sedangkan untuk kelompok yang lama dapat di tingkatkan pinjamannya modal usaha melihat kondisi usaha kelompok serta kemampuan anggota kelompok untuk mengembalikan cicilan setiap bulannya.

Untuk melihat perkembangan kelompok UPPKS yang ada di Kota Payakumbuh dapat di lihat dengan membandingkan perkembangan

kelompok selama 3 (tiga) tahun terakhir dan kondisi awal kelompok mulai beroperasi dengan kondisi kelompok sekarang melalui aspek: jenis usaha, Pengelolaan usaha, omset usaha dan pemasaran hasil usaha. Aspek-aspek tersebut dapat di lihat berikut ini.

1. Perkembangan Jenis Usaha

Untuk jenis usaha anggota kelompok tetap menekuni usahanya yang dirintis sejak awal sampai sekarang ini, kelompok Sarumpun Sorai dengan usaha makanan ringan kripik yang terbuat dari ubi kayu dan kerajinan, kelompok Karya bersama dengan hasil pertanian sayur-sayuran, kelompok Bunga Tanjung dengan usaha ternak ikan lele, Kelompok Dahlia kerajinan dan Kelompok Lamposi I usaha jualan / dagang.

2. Perkembangan Pengelolaan Usaha

Pengelolaan UPPKS dalam rangka peningkatan pendapat anggota keluarga yang tergabung dalam kelompok UPPKS di maknai bagaimana pengurus kelompok mengelola kegiatan UPPKS dengan pola yang di lakukan dan peralatan yang di gunakan. Adapun pengurus yang di maksud dalam kelompok terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang bekerja untuk mengaktifkan jalannya kelompok, mereka yang telah di tunjuk untuk mengelola kelompok turut bertanggungjawab atas keberhasilan kelompok yang di kelola, serta memberikan contoh kepada anggota yang tergabung dalam kelompok UPPKS.

Pengelolaan kelompok yang baik, anggota yang terlibat dalam kepengurusan harus memahami tugas dan fungsinya masing-masing

kelompok yang di kelola dapat berkembang sesuai dengan yang di harapkan. Sebagai anggota dituntut partisipasi untuk memajukan kegiatan kelompok dan mengikuti aturan-aturan kelompok yang telah di sepakati bersama. Pengelolaan usaha adalah proses kegiatan kelompok UPPKS yang dilakukan secara terencana dalam upaya mengarahkan kelompok UPPKS untuk menghasilkan produk sesuai dengan kemampuan dalam melakukan usaha. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan pengelolaan usaha kelompok UPPKS menurut BKKBN (2013) sebagai berikut :

1. Pengurus kelompok yang telah di tunjuk harus mempunyai tekad untuk keberhasilan dan mempunyai ciri sikap kewirausahaan.
2. Pengelola harus mampu mengelola usaha secara baik dengan membuat perencanaan kegiatan usaha, memberikan tugas sesuai dengan kemampuan, menjaga ketetapan perencanaan serta melakukan pengawasan.
3. Dalam mengelola usaha selalu harus menempuh langkah dasar yang meliputi:
 - 1) Menentukan jenis bentuk usaha, mengadakan perhitungan usaha dan mempelajari kondisi pasar.
 - 2) Membuat perencanaan kegiatan usaha
 - 3) Memberikan tugas sesuai dengan kemampuan
 - 4) Menjaga ketepatan perencanaan dan melakukan pengawasan

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa seluruh anggota kelompok UPPKS melakukan usaha sendiri dalam lingkungan rumah

tangga , pada tahun 2013 anggota kelompok Sarumpun Sorai dan kelompok dahlia melakukan usaha bersama dengan persentase 47.62 persen dan usaha sendiri 52.38 persen. Dari hasil wawancara yang di lakukan dengan responden di ketahui bahwa kecendrungan anggota kelompok melakukan usaha sendiri adalah karena putaran usaha yang dilakukan sendiri akan memberi hasil yang cepat di bandingkan dengan usaha yang di lakukan secara berkelompok.

Dalam mengelola usaha, kelompok UPPKS di Kota Payakumbuh masih dominan menggunakan alat tradisional di banding alat teknologi tepat guna, 94.20 % responden masih mengelola usaha secara tradisional sedangkan untuk pengolahan makanan ringan gunakan teknologi tepat guna hanya 5,80 %. Kelompok yang menggunakan teknologi tepat guna adalah kelompok Sarumpun Sorai di Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kelompok Bunga Tanjung di Kecamatan Payakumbuh Timur.

3. Perkembangan Omset Usaha

Chaniago (1988) mengatakan omset adalah pendapatan yang di dapat dari hasil penjualan suatu barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya Swastha (1993) mengatakan omset penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang di hitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akutansi. Dari divinisi diatas dapat di simpulkan bahwa omset adalah keseluruhan penjualan barang/jasa

dalam kurun waktu tertentu, yang di hitung berdasarkan jumlah uang yang di peroleh. Omset usaha merupakan indikasi dari kemajuan suatu usaha yang berorientasi pasar. Kelompok UPPKS ini akan tumbuh dan berkembang apabila omsetnya bertambah. Sebelum dan setelah menggunakan modal kelompok UPPKS yang relative kecil untuk melakukan usaha.

Penambahan modal usaha khususnya modal kerja pada usaha kecil kelompok UPPKS, diharapkan mampu memberikan peningkatan terhadap omset usahanya. Pada penelitian ini, karena keterbatasan data hanya omset usaha dalam satuan rata-rata satu bulan yang dapat di tampilkan.

Omset penjualan masing masing anggota kelompok dari tahun 2013 menunjukkan progres yang meningkat, kecuali untuk satu kelompok lamposi I di Kelurahan Sungai Durian tidak memperolehnya karena semenjak pertengahan tahun 2014 kelompok Lamposi I macet, anggota kelompok tidak mampu mencicil pinjaman yang di berikan oleh BPMP dan KB, dan usaha yang dilakukan dengan menggunakan pinjaman modal BPMP dan KB tidak dapat di laksanakan.

Dari Tabel 25 di atas dapat di bandingkan kondisi awal dengan sekarang, terjadi peningkatan omset yang signifikan pada rentang omset besar dari 1 juta sampai dengan 3 juta dengan persentase 55.07 % dan pada rentang omset besar dari 3 juta sampai dengan 5 juta 18.84 persen. Bila di lihat kembali, maka hal ini mencerminkan bahwa usaha kecil yang menerima pinjaman program UPPKS ini memang memerlukan modal untuk menjalankan usahanya. Adapun hal tersebut sejalan dengan

pendapat Anoraga (2002), yang menyatakan bahwa dalam pengembangannya usaha kecil mengalami permasalahan, dan masalah modal merupakan kendala terbesar dalam menjalankan usaha.

Bila di kaitkan dengan substansi tujuan dari program, dimana tujuan utama adalah untuk menambah modal usaha dalam arti berupa modal kerja bagi keluarga pra sejahtera dan KS 1. Untuk itu perlu peningkatan modal usaha agar anggota UPPKS dapat meningkatkan usaha dan memenuhi peningkatan pendapatan yang di harapkan. Berdasarkan pendataan keluarga yang di lakukan oleh BPMP dan KB tahun 2014 jumlah kepala keluarga adalah 31.907 KK. Keluarga yang berada pada posisi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada tahun 2014 adalah 5107 KK. Sedangkan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang tergabung dalam kelompok UPPKS hanya 444 KK. Dengan demikian, berbagai program lain untuk memperbaiki aspek permodalan keluarga pra sejahtera dan KS 1 masih sangat di butuhkan.

4. Perkembangan Pemasaran Hasil Usaha.

Pemasaran hasil usaha kelompok UPPKS oleh anggota yang melakukan usaha 94.20 % untuk Kota Payakumbuh. Sedangkan 5.80% hasil usaha di pasarkan keluar Kota Payakumbuh terutama untuk usaha makanan ringan, hasil pertanian dan ternak ikan lele yang sampai ke Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Tambunan (2003), bahwa pada umumnya orientasi pemasaran dari usaha yang tergolong usaha kecil dan menengah pada wilayah dimana produksi di lakukan.

Selanjutnya untuk pemasaran hasil usaha yang di lakukan pada tahun 2013 di pasarkan di wilayah Kota Payakumbuh. Seiring dengan perkembangan kelompok tahun berikutnya hasil usaha sudah dapat di pasarkan di luar kota Payakumbuh. Khusus untuk makanan ringan yang di lakukan oleh kelompok Sarumpun Sorai hasil produk di pasarkan wilayah Kota Pekanbaru, dan songkok ayam juga sudah memenuhi permintaan daerah tetangga seperti Tanah Datar dan Bukittinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anoraga, Pandji. 2002. Koperasi, Kewirausahaan Dan Usaha Kecil, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahrum, S. 2001. Analisis Kegiatan Kelompok UPPKS dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengembangan Wilayah Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Bappenas. 2006. Pengurangan Ketimpangan dan Pembangunan Wilayah. (www.bappenas.go.id)
- Baron, R.A and Byrne, D. 1997. Social Psychology: Understanding Human Interaction. Eight Edition. United State of America: Allyn and Bacon, Inc
- BKKBN. 1993. Penuntun Konseling KB untuk PLKB dan PPLKB. Jakarta. BKKBN
- BKKBN. 2003. Buku Panduan Praktis Pelayanan Keluarga Berencana. 51-56 Jakarta.
- BKKBN. 2005. Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Bagi Penduduk Miskin. Jakarta: BKKBN
- BKKBN. 2008. Program KB di Indonesia. <http://www.bkkbn.go.id>. diakses tanggal 12 Juli 2015.
- BKKBN. 2012. Evaluasi Program Kependudukan dan KB. Semarang.
- BKKBN. 2013. Profil Pendataan Keluarga Tahun 2012. Jakarta.
- BKKBN.1996. Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan kemiskinan, Jakarta,
- BPS Kota Payakumbuh. 2015. Payakumbuh dalam Angka 2014. Payakumbuh.
- BPS. 2004. Monitoring dan Kajian Terhadap Program Kemiskinan di Indonesia, Jakarta.
- Chaniago, Arifinal. 1988. Perkoperasian Indonesia. Bandung : Angkasa Bandung.
- Friedman, M. M. 1988. Keperawatan Keluarga. Teori dan Praktek Edisi 3. Jakarta : EGC
- Gilarso, T. 1992. Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro. Kanisius. Yogyakarta.
- Goodman & Pennings (eds).1980. New Perspectives on Organizational Effectiveness. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Handoko, T. Hani. 1992. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, Edisi Kedua, Cetakan Keempat. Penerbit Yogyakarta. BPFE UGM
- Heryendi, Wycliffe Timotius. 2013. Efektivitas Program Usaha

- Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Denpasar Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 6, No.2, 71-143
- Hikmat, H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora. Bandung
- Hurlock, Elizabet. B. 1995. *Perkembangan Anak*. Edisi Keenam. Jakarta.
- Irawan, F.W dan Sudjoni. 1998. *Pemasaran : Prinsip dan Kasus*. BPFE, Yogyakarta.
- Kecamatan Payakumbuh Barat. 2015. *Laporan data monografi wilayah kota payakumbuh*. Kota Payakumbuh
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Megawangi, R. 1999. *Membiarkan Berbeda, Sudut pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung. Mizan Media Utama, edisi 2 2001
- Menteri negara Kependudukan. 1996. *Panduan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Kukesra) Edisi II*. Jakarta
- Mongid. 1996. *Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana
- Mubyarto. 2002. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Edisi Ketiga. LP3ES. Jakarta.
- Mulyono, A. 2006. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka cipta.
- Munandar, M. 2001. *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoodinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Puspito, Hendro, D. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Kanisius:Yogyakarta
- Sajoyjo dan Pudjiwati, S. 1983. *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*. Jakarta: Gajah Mada University
- Soekanto, S. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : CV.Rajawali
- Steers, M.R. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta. Erlangga.
- Subagyo. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Go Public Sector Property Dan Real Estate*. *Jurnal Akuntansi*, Volume 9, Nomor 2, Mei : 149-168.
- Sunarti, E. 2008. *Keragaan pemetik teh wanita: sosial ekonomi, ketahanan keluarga, konsumsi pangan, pertumbuhan dan perkembangan anak* [laporan penelitian]. Bogor. Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Supadi. 2008. *Partisipasi Petani Untuk Meningkatkan Produksi Kedelai Menuju Swasembada*. *Jurnal Litbang Pertanian*, 27(3): 06-111
- Supriatna, T. 1997. *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press, Bandung.

- Swastha, Basu. 1993. Pengantar Bisnis Modern. Edisi Ketiga. Liberty. Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2003. Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Usman, Bonar M. Sinaga, dan Hermanto Siregar. 2004. Determinan kemiskinan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal. Tesis. Tidak Dipublikasikan.
- Wawan. 2011. Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap. Yogyakarta : Nuha Medika

